

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Hadist Rasulullah Muhammad S.A.W Hadist Shahih Bukhori Indonesia,
maktabah.istinbat.com

Buku

Amari, Mohammad., *Politik Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2013.

Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

_____ *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003

Butu, Nasim, *Science and Muslim Society, terjemah: Sains dan Masyarakat Muslim*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum.*, Libery, Yogyakarta, 1998.

Djaja, Ermansyah., *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

_____ *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Evi, Hartanti, **Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi**, 2008

Hamzah, Jur Andi., *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

_____ *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Harahap, Yahya., *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.

Merani, Ira Alia., *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018.

- Mulyadi, Lilik., *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2010.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Purnomo, Bambang, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Ghalia, Yogyakarta, 1992.
- Ridman., *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandmen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977
- Tiena Masriani, Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Wahyuningsih, Sri Endah, *Perbandingan Hukum Pidana dari Prespektif Religious Law*, Unissula press, Semarang, 2103.

Undang-Undang / Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasarakatan
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Umdamh-Undang.

Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Perpu No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 tentang tentang Hukuman Tutupan

PerMA No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

PP No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019.

Jurnal

Ira Alia Maerani, 2015, “Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila” Volume II Nomor 2 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1364/1048>

Muhammad Fauzar Rivaldy, “Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan Sebagai Alternatif Pemenjaraan Baru Dalam Upaya Mengatasi *Over capacity*/Kelebihan Kapasitas Di Dalam Lembaga Per masyarakatan” <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/viewFile/21591235>

Natasya Claudia, 2018, “Pembaharuan Kebijakan Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi” Volume. 7 Nomor 3 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/22786/20834> diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Internet

10 Tahun SBY Utang Naik Rp 1.209 T, 4 Tahun Jokowi Rp 1.809 T oleh Wahyu Daniel <https://www.cnbindonesia.com/news/20190123123917-4-51967/10-tahun-sby-utang-naik-rp-1309-t-4-tahun-jokowi-rp-1809-t>
Hak Cipta dan Hukum Mencuri, <https://www.pesantrenvirtual.com>

Hakim Yang Ideal Menurut Kaca Mata Islam,
<http://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/a3882-Hakim-yang-ideal-menurut-kacamata-islam-pdf>

<http://quran-id.com>

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Hukum> diakses tgl 30/09/2019 pkl 10.14

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/pidana-khusu/korupsi>
Hukum Pidana Islam https://iraaliamerani.files.wordpress.com/2017/03/hk-pidana-islam_ira.ppt

Inilah 3 Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa
<https://m.republika.co.id/amp/lztpqj>

Putusan Hakim Masih Menjadi Tantangan Pemberantasan Korupsi
<https://amp.tirto.id/putusan-Hakim-masih-menjadi-tantangan-pemberantasan-korupsi-cBq2>

Sejarah Singkat Awal Mula Kasus Korupsi Di Indonesia Pasca Kemerdekaan
<https://Indocropcircles.wordpress.com/2017/09/14/sejarah-singkat-awal-mula-kasus-korupsi-di-indonesia/amp/>